



# PEMUTAKHIRAN, ANALISIS DAN PEMANFAATAN DTKS KABUPATEN BANDUNG BARAT

## PESAN UTAMA

- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berisi data dan informasi tentang sosial ekonomi dari 40% rumah tangga termiskin yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program-program perlindungan sosial dan sektoral di daerah.
- DTKS dapat dianalisis secara sektoral dan spasial sampai tingkat desa/desa yang dapat mendukung proses perumusan kebijakan berbasis bukti/data di daerah.
- Secara umum, pemutakhiran DTKS di Kabupaten Bandung Barat masih rendah dengan **prosentase perbaikan 15,55% dan usulan baru 8,11%**. Prediksi akurasi pemutakhiran data juga tergolong rendah.
- Sebaran jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di tingkat desa perlu mendapat perhatian dan pemetaan lebih lanjut, terutama desa-desa dengan penduduk miskin dan rentan miskin yang cukup banyak serta jumlah anggota rumah tangga/keluarga yang besar.
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid masih cukup banyak, sekitar 25% dari total individu dalam DTKS sebanyak 590.866 jiwa, yang dapat menghambat akses penduduk miskin dan rentan miskin terhadap program bantuan sosial dan layanan dasar lainnya.
- Penduduk miskin dan rentan miskin dengan kepala keluarga perempuan berusia di atas 60 tahun yang tidak bekerja dan menderita penyakit kronis masih ditemukan di sejumlah desa.
- Mayoritas penduduk dalam DTKS mempunyai lapangan usaha di bidang bangunan/konstruksi dengan status pekerjaan sebagai pekerja bebas non pertanian. Sementara mayoritas kedua status pekerjaan penduduknya adalah pekerja bebas pertanian padi dan palawija dengan status pekerjaan sebagai pekerja bebas pertanian.
- Proporsi penduduk miskin dan rentan miskin dalam DTKS yang sekaligus menerima beberapa program bansos/perlindungan sosial masih rendah, menunjukkan kecenderungan serupa dengan yang ada di tingkat nasional. Sementara secara teoritis, kelompok termiskin seperti penerima PKH berhak sekaligus menerima Program Kartu Sembako/BPNT dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

## Keaktifan Pemutakhiran DTKS

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang kurang aktif melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Hingga Januari 2020, prosentase perbaikan DTKS di Kabupaten Bandung Barat hanya 15,55% dengan usulan baru 8,11%, dan termasuk kategori perbaikan rendah dengan prediksi akurasi data yang juga rendah. Dengan rendahnya tingkat keaktifan ini, Kabupaten Bandung Barat menduduki peringkat 222 diantara seluruh kabupaten/kota di Indonesia dalam ranking verifikasi dan validasi DTKS.

Selain itu, seperti terlihat pada Gambar 1, prosentase perbaikan DTKS untuk Bantuan Sosial Pangan (BSP) hanya 0,56% dan belum ada perbaikan untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk memastikan penduduk miskin dan rentan miskin dalam DTKS menerima kedua program tersebut.

Gambar 1: Keaktifan Pemutakhiran DTKS Kabupaten/Kota s/d Januari 2020

KEAKTIFAN VERVAL KABUPATEN/KOTA S.D. JANUARI 2020							
Kode	Kabupaten/Kota	Provinsi	Prosentase Perbaikan DTKS	Prosentase Usulan Baru DTKS	Prosentase Perbaikan BSP	Prosentase Perbaikan PBI	Rangking Verval Nasional
3217	Bandung Barat	Jawa Barat	15,550	8,110	0,560	0,000	222
3204	Bandung	Jawa Barat	17,970	0,920	0,000	0,000	258
3273	Kota Bandung	Jawa Barat	4,730	2,710	12,860	0,000	297

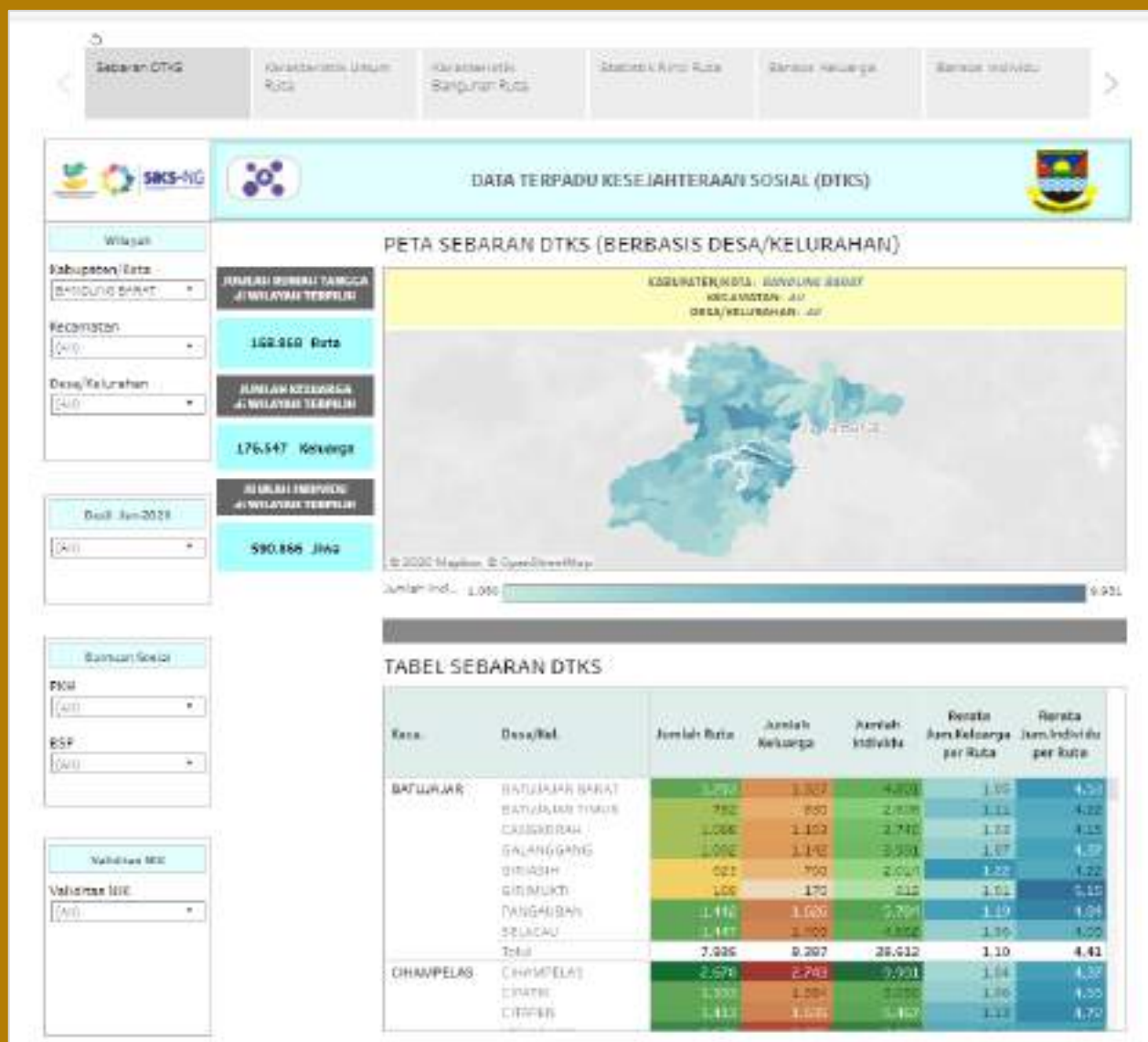
Showing 1 to 3 of 3 entries (filtered from 514 total entries) Previous 1 Next

## Sebaran DTKS Berbasis Kelurahan

Dalam DTKS, terdapat 590.866 jiwa atau 168.868 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Kabupaten Bandung Barat, tersebar di 16 kecamatan dan 166 desa. Beberapa desa yang memiliki penduduk miskin dan rentan miskin banyak, diantaranya desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas dengan 9.931 jiwa, desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah 8.317 jiwa, dan desa Citatah Kecamatan Cipatat 7.552 jiwa. Sementara yang paling sedikit penduduk miskin dan rentan miskinnya adalah desa Girmukti Kecamatan Batujajar, dengan hanya 812 jiwa.

Pola sebaran jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di tingkat desa perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat, terutama beberapa desa dengan jumlah penduduk miskin dan rentan miskin paling besar. Pemetaan lebih lanjut terkait tingkat kemiskinan dan kerentanan, faktor-faktor penyebab banyaknya penduduk miskin dan rentan miskin, serta potensi dan kebutuhan intervensi program di desa-desa tersebut perlu dilakukan.

Gambar 2: Sebaran DTKS Berbasis Desa/Kelurahan



## Rerata Jumlah Keluarga dan Individu Per Rumah Tangga

Selain sebaran jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di tingkat desa, informasi penting yang perlu mendapat perhatian adalah jumlah keluarga dan individu dalam rumah tangga. Informasi ini dapat membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan intervensi program dari rumah tangga atau keluarga miskin dan rentan miskin.

Secara umum, rerata jumlah keluarga dan individu per rumah tangga, masing-masing sebanyak 1,08 keluarga dan 4,32 individu. Beberapa desa memiliki rerata jumlah keluarga dan/atau individu per rumah tangga yang cukup besar, diantaranya Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong dengan 1,34 keluarga dalam satu rumah tangga dan Desa Cibitung Kecamatan Rongga dengan 5,53 individu dalam satu rumah tangga.

Gambar 3: Rerata Jumlah Keluarga dan Individu Per Rumah Tangga Berdasarkan Kelurahan

Kec.	Desa/Kel.	Jumlah Ruko	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Rerata Jum.Keluarga per Ruko	Rerata Jum.Individu per Ruko
PANGKALANEUNDEAN	CIRANJANG	1.090	1.259	4.541	1,25	5,01
	CIRANJANG BAHAYU	643	640	1.897	1,02	3,93
	CHIDEUNG	489	489	1.094	1,01	3,17
	CWARUGA	358	915	3.390	1,34	5,23
	KARAWANGI	526	537	1.543	1,04	3,72
	SARAWANG	876	690	3.307	1,03	4,01
	TUMI	5.284	5.679	18.526	1,14	4,54
RONGGA	BOJING	1.026	1.030	3.494	1,01	4,00
	BOJINGSALAM	718	721	2.133	1,01	3,55
	CEBEDI	1.417	1.433	4.477	1,01	3,89
	CIBITUNG	1.057	1.118	4.965	1,06	5,53
	CIKADAB	996	821	2.372	1,01	3,20

## NIK Invalid (Invalid)

Salah satu faktor yang memengaruhi akses penduduk miskin dan rentan miskin terhadap program perlindungan sosial dan layanan dasar lainnya adalah validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum terpadankan dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Penduduk yang memiliki NIK tidak valid di Kabupaten Bandung Barat masih cukup besar yaitu mencapai 147.797 jiwa atau sekitar 25% dari total individu dalam DTKS yang tersebar di

seluruh kecamatan dan desa. Sejumlah desa memiliki NIK tidak valid di atas 2.000 jiwa, dengan jumlah paling besar mencapai 2.246 jiwa di desa Cikole kecamatan Lembang.

Gambar 4: Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tidak Valid berdasarkan Desa/Kelurahan

Kec.	Desa/Kel.	Jumlah Rute	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Rerata Jum. Keluarga per Rute	Rerata Jum. Individu per Rute
CIBOGG		458	472	1.811	1,04	4,08
CIKAHURIPAN		351	360	869	1,37	1,32
CIKIDANG		350	302	517	1,01	3,32
CIKOLE		904	900	2.246	1,01	2,42
GEDONGSAHURIPAN		381	387	372	1,06	4,73
JAYAJIRI		751	766	1.691	1,06	4,54
NAVUAMBON		185	170	330	1,07	4,18
LANGENSAR		624	635	1.471	1,05	4,32
LEMBANG		335	344	892	1,08	4,20
MEKARAWANGI		150	153	296	1,00	4,21
PAGERWANGI		269	271	490	1,07	4,18
SILIGIRI		558	576	1.176	1,12	4,18
CIKIDANG		350	302	517	1,01	3,32

### Karakteristik Kepala Rumah Tangga dan Kepala Keluarga

Mayoritas kepala rumah tangga atau kepala keluarga miskin dan rentan berusia diantara 41-59 tahun mencapai hampir setengah dari total rumah tangga atau total keluarga dalam DTKS. Sementara lebih dari seperempat kepala rumah tangga dan kepala keluarga berusia di atas 60 tahun.

Terdapat 16.985 Kepala Rumah Tangga atau 18.621 Kepala Keluarga yang berusia di atas 60 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan tidak bekerja. Sebaran tertinggi Kepala Rumah Tangga dan Kepala Keluarga berjenis kelamin perempuan dan tidak bekerja berada pada Desil 2.

Diantara kepala rumah tangga dan kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan dan tidak bekerja, terdapat 1.523 dan 1.688 yang menderita penyakit kronis diantaranya hipertensi, masalah jantung, stroke, dan kanker atau tumor ganas. Seperti terlihat pada Gambar 5.b, sebagian besar dari kelompok Kepala Rumah Tangga dan Kepala Keluarga ini berada di desil 2.

Gambar 5.a: Karakteristik Umum Kepala Rumah Tangga dan Kepala Keluarga



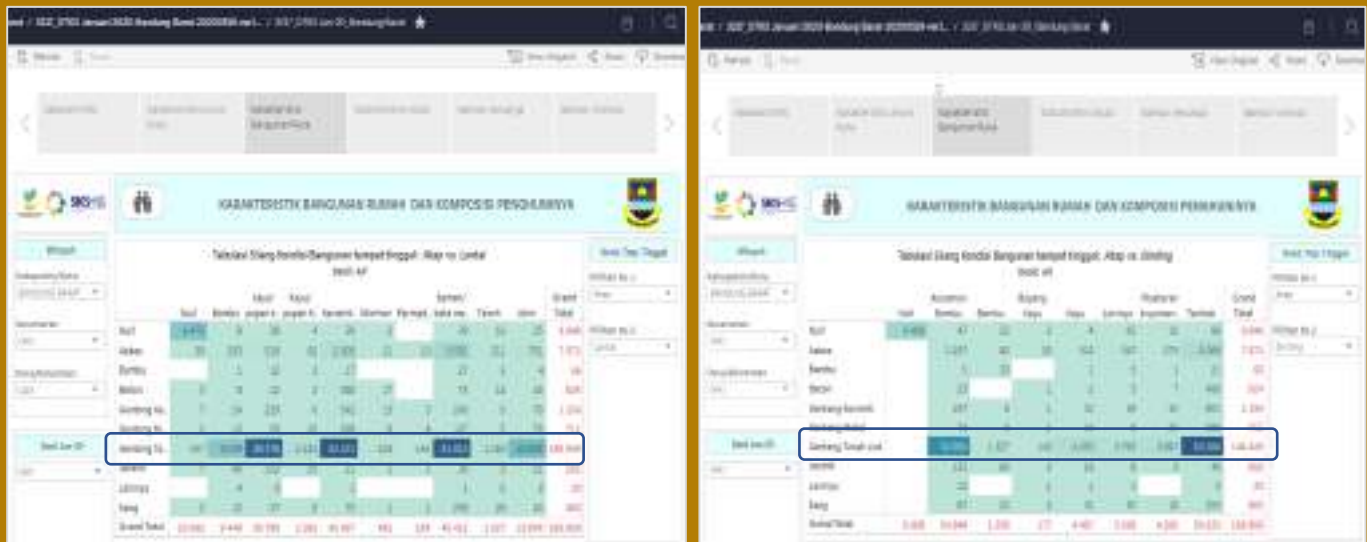
Gambar 5.b: Status Pekerjaan dan Jenis Penyakit Kepala Rumah Tangga/Kepala Keluarga



### Karakteristik Bangunan Rumah Tangga

Mayoritas atap rumah penduduk yang ada di DTKS terbuat dari genteng tanah liat. Hampir setengah diantaranya beratap genteng tanah liat dengan dinding berjenis tembok dan sekitar 30% dengan dinding berjenis anyaman bambu. Sementara, 25% rumah penduduk dalam DTKS beratap genteng tanah liat dengan lantai berjenis keramik, diikuti lantai semen/bata merah 24% dan lantai kayu/papan kualitas rendah 23%.

Gambar 6: Kondisi Bangunan Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin



Kategori	Jumlah	Persentase	Rincian	
			Sub-kategori 1	Sub-kategori 2
Total	19.991	100%	19.991	19.991
Miskin	19.991	100%	19.991	19.991
Rentan Miskin	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 1	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 2	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 3	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 4	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 5	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 6	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 7	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 8	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 9	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 10	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 11	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 12	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 13	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 14	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 15	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 16	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 17	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 18	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 19	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 20	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 21	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 22	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 23	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 24	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 25	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 26	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 27	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 28	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 29	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 30	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 31	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 32	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 33	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 34	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 35	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 36	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 37	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 38	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 39	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 40	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 41	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 42	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 43	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 44	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 45	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 46	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 47	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 48	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 49	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 50	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 51	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 52	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 53	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 54	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 55	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 56	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 57	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 58	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 59	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 60	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 61	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 62	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 63	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 64	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 65	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 66	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 67	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 68	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 69	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 70	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 71	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 72	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 73	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 74	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 75	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 76	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 77	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 78	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 79	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 80	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 81	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 82	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 83	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 84	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 85	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 86	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 87	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 88	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 89	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 90	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 91	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 92	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 93	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 94	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 95	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 96	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 97	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 98	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 99	19.991	100%	19.991	19.991
Sub-kategori 100	19.991	100%	19.991	19.991

### Karakteristik Individu dan Rumah Tangga Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan, mayoritas penduduk Kabupaten Bandung Barat yang berada dalam DTKS mempunyai lapangan usaha di bidang bangunan/konstruksi dengan status pekerjaan sebagai pekerja bebas non pertanian sebanyak 19.991 orang.

Kemudian berdasarkan status pekerjaan, kepala rumah tangga dalam DTKS, mayoritas adalah pekerja bebas sektor bangunan konstruksi (14%), diikuti pekerja bebas pertanian padi dan palawija (13%), dan buruh bangunan/konstruksi (10%), dengan penghasilan maksimal diperkirakan sebesar UMK. Nilai UMK Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.145.427,79.

Jenis pekerjaan kepala rumah tangga yang lain diantaranya usaha sendiri di bidang buruh industri pengolahan, berusaha sendiri perdagangan dan pekerja bebas lainnya, masing masing sebesar 5%.



Gambar 7a: Status Pekerjaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin

Lapangan usaha ART	Status kedudukan pekerjaan								
	Berusaha Sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	Berusaha dibantu buruh tetap	Buruh/Karyawan Swasta	PNS/BUMN / BUMD	Pekerja Bebas pertanian	Pekerja bebas non pertanian	Pekerja keluarga	Grand Total
Pertanian tanaman padi & Hortikultura	3319	699	330	4783	4	17874	970	1422	29401
Perkebunan	569	244	42	2652	1	5771	114	264	9656
Perikanan tangkap	197	29	62	867	1	645	143	47	1991
Perikanan budidaya	126	9	10	118		34	94	8	399
Peternakan	125	10	14	174		44	80	6	453
Kehutanan & pertanian lainnya	515	56	26	591		234	227	343	1992
Pertambangan/penggalian	94	19	18	232	1	668	98	33	1163
Industri pengolahan	51	5	20	414		15	387	9	901
Listrik dan gas	707	194	240	14075	7	60	1727	81	17091
Bangunan/konstruksi	32	2	8	198	3	10	49	1	303
Perdagangan	1340	236	673	13489	2	255	19991	45	36031
Hotel & rumah makan	7658	419	156	3282	3	128	1491	619	13756
Transportasi & pergudangan	285	30	27	1394		7	143	41	1927
Informasi & komunikasi	2014	34	103	3067	2	67	1703	28	7018
Keuangan & asuransi	16	1	4	107	2	1	23	2	156
Jasa pendidikan	6			108	4	3	9		130
Jasa kesehatan	50	13	11	537	43	6	76	24	760
Jasa kemasyarakatan.	23	1	2	140	4	3	36	3	212
Pemulung	748	44	155	5088	53	301	3160	66	9615
Lainnya	384	25	25	174		33	439	59	1139
Grand Total	2991	711	981	7646	9	650	8215	1390	22593
Grand Total	21253	2786	2908	59140	138	26810	39175	4492	156703

Gambar 7b: Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin

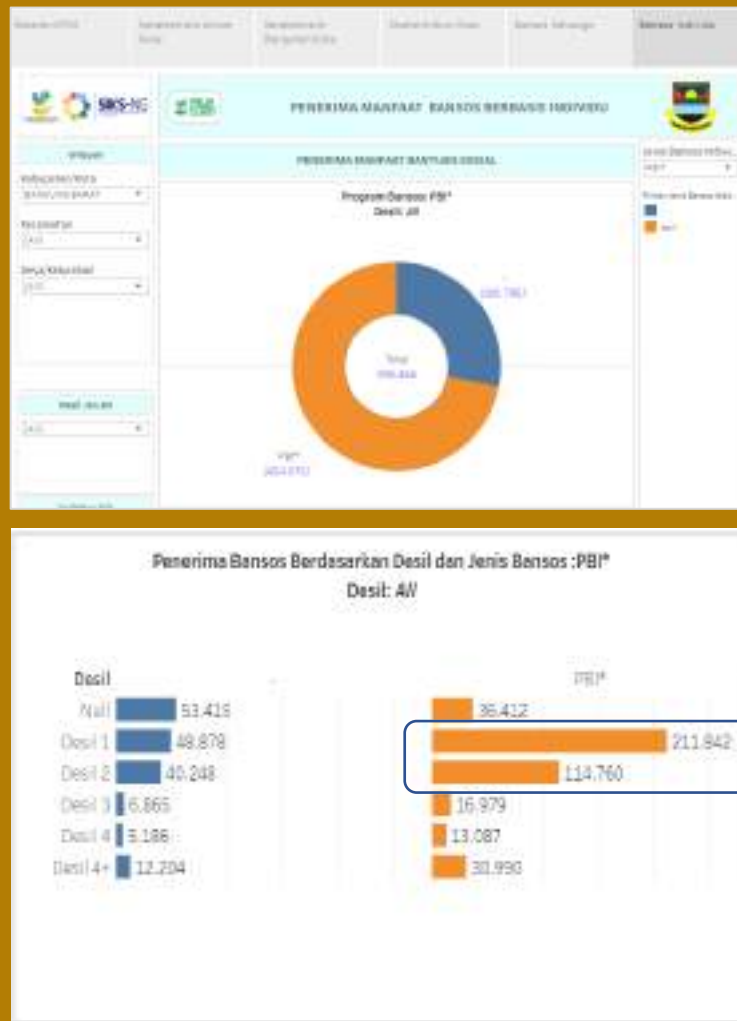
Lapangan usaha ART	Status kedudukan pekerjaan								
	Berusaha Sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	Berusaha dibantu buruh tetap	Buruh/Karyawan Swasta	PNS/BUMN / BUMD	Pekerja Bebas pertanian	Pekerja bebas non pertanian	Pekerja keluarga	Grand Total
Pertanian tanaman padi & palawija	2,991	605	282	3,791	4	13,801	762	547	22,777
Hortikultura	481	197	31	1,703		3,672	83	37	6,203
Perkebunan	161	26	45	599	1	483	118	28	1,461
Perikanan tangkap	107	9	7	80		24	71	4	302
Perikanan budidaya	109	9	12	116		36	63	3	348
Peternakan	362	44	18	418		156	164	71	1,233
Kehutanan & pertanian lainnya	87	17	15	178	1	577	84	25	984
Pertambangan/penggalian	45	5	17	312		11	298	3	691
Industri pengolahan	557	152	143	5,464	1	34	806	10	7,167
Listrik dan gas	26	2	7	123	1	6	31	1	197
Bangunan/konstruksi	1,250	176	521	10,167		194	14,719	33	27,058
Perdagangan	5,172	256	105	1,730	1	86	1,008	73	8,431
Hotel & rumah makan	185	20	4	406			50	7	672
Transportasi & pergudangan	1,696	28	84	2,247	2	52	1,308	21	5,438
Informasi & komunikasi	8		3	27	1	1	10	1	51
Keuangan & asuransi	5			23		3			31
Jasa pendidikan	33	6	4	233	19	2	37	20	354
Jasa kesehatan	18			53	4	1	20	3	99
Jasa kemasyarakatan. pemerintahan.	607	37	100	3,204	31	221	2,225	27	6,452
Pemulung	338	19	15	143		23	348	37	923
Lainnya	2,209	540	629	4,876	6	455	5,265	389	14,368
Grand Total	16,447	2,153	2,043	35,894	72	19,839	27,469	1,341	105,217



## Komplementaritas Bantuan Sosial (Bansos)

Gambar 8a dan 8b menyajikan proporsi penerima dan komplementaritas program bantuan sosial di tingkat Kabupaten Bandung Barat. Dari total 590.866 jiwa yang ada di DTKS, sebanyak 424.070 jiwa atau sekitar 72% sebagai PBI JK. Mayoritas PBI JK tersebar di desil 1 dan 2, masing-masing 211.842 dan 114.760 jiwa.

Gambar 8a: PBI-JK Berdasarkan Desil

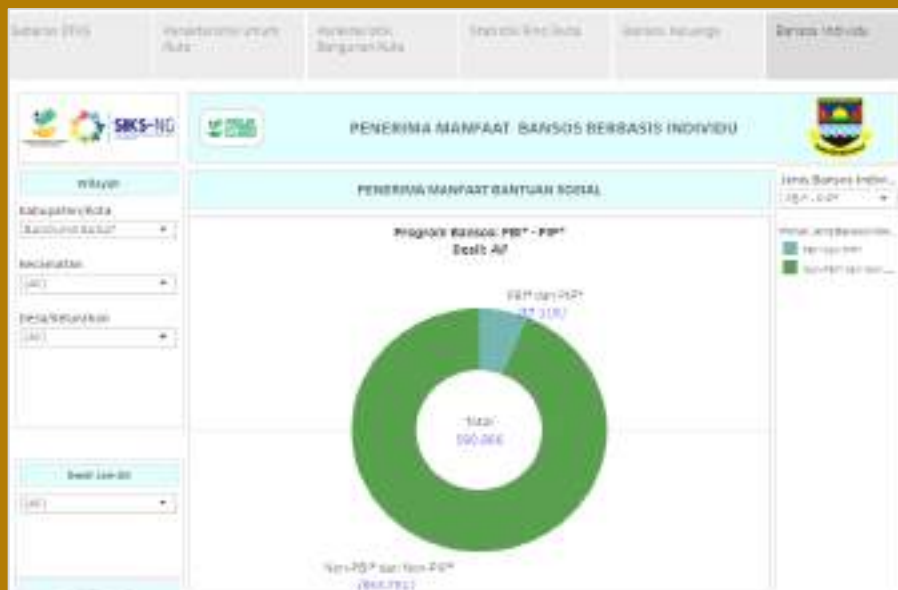


Proporsi penduduk miskin dan rentan yang menerima lebih dari satu program sekaligus memiliki kecenderungan serupa dengan yang ada di tingkat nasional. Seperti terlihat pada gambar 8b, sebanyak 34% keluarga dalam DTKS di Kabupaten Bandung Barat menerima PKH dan BSP sekaligus. Dari total 59.442 keluarga penerima kedua program ini, mayoritas berada di desil 1 sebanyak 67% keluarga dan desil 2 sebanyak 16% keluarga.

Sementara, individu dalam DTKS yang menerima PBI dan PIP sekaligus hanya 6%. Dari total 37.115 jiwa penerima kedua program ini, mayoritas berada di desil 1 sebanyak 23.085 jiwa (62%) dan desil 2 sebanyak 8.207 jiwa (22%).

Secara teoritis, seluruh penerima PKH sebagai kelompok termiskin berhak menerima BSP dan PBI sekaligus. Penerima PKH yang memiliki anak usia sekolah juga seharusnya menerima PIP.

Gambar 8b: Komplementaritas Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga dan Individu





## REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu aktif melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara periodik sesuai pedoman pemutakhiran data yang telah disiapkan dan disepakati dengan pemerintah pusat melalui Pusdatin Kesos Kementerian Sosial RI.
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memanfaatkan DTKS secara lebih luas untuk mendukung perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan dan program sektoral di daerah. Tool Dashboard Business Intelligence DTKS yang telah dikembangkan oleh Pusdatin Kesos Kementerian Sosial RI dapat digunakan untuk ini.
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perlu melakukan pendalaman atas pemetaan dan beberapa temuan di atas dengan melibatkan sumberdaya manusia yang ada di daerah seperti fasilitator SLRT-Puskesmas, potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), dan pendamping desa.
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memastikan penerimaan program perlindungan sosial, baik program pusat maupun daerah termasuk yang dikelola oleh pihak non pemerintah, terutama di desa yang jumlah penduduk miskin dan rentan miskinnya besar.
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memperkuat mekanisme pemantuan program perlindungan sosial dan penanganan keluhan warga sampai tingkat desa sehingga permasalahan terkait program-program perlindungan sosial dapat ditangani segera dengan baik.
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat memberikan intervensi berupa program bantuan sosial yang dikelola pemerintah daerah dan/atau pihak lain seperti dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan kelompok filantropis lainnya, kepada rumah tangga dalam DTKS yang tidak menerima program bantuan sosial.
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memastikan kelompok yang paling rentan seperti kepala keluarga perempuan berusia di atas 60 tahun yang tidak bekerja dan menderita penyakit kronis menerima bantuan sosial dan/atau layanan kesehatan.
- Berdasarkan pemetaan melalui analisis komplementaritas program perlindungan sosial, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memastikan kelompok termiskin seperti penerima PKH sekaligus dapat menerima PBI JK dan Program Kartu Sembako atau program sejenis yang dikelola pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya.
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan pemutakhiran data untuk Program Kartu Sembako dan PBI JK dan melalui kerjasama antara Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil untuk memperbaiki NIK tidak valid yang jumlahnya masih cukup besar.